

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
( LKPJ )**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KAMPUNG**

**KABUPATEN BERAU**

**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya kita dapat melaksanakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau akhir Tahun 2017 dalam upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam format penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam LKPj ini memuat program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021.

Berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau adalah tidak terlepas dari dukungan semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik. Karena itu perlu terus ditingkatkan pada masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua dalam usaha mewujudkan kesejahteraan kita bersama. Amin.

Tanjung Redeb, 24 Januari 2018

KEPALA DINAS,

IR. H. ILYAS NATSIR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651231 199203 1 105

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Hukum .....	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi .....	7
D. Daftar Urut Kepangkatan .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II     PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA DPMK Kabupaten Berau .....	16
B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA DPMK Kabupaten Berau .....	17
C. Program Prioritas DPMK Kabupaten Berau dan Realisasi Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 .....	36
D. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas DPMK Kabupaten Berau Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 .....	37
E. Permasalahan dan Solusi .....	39
BAB III    PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN .....	41
BAB IV    PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....	42
BAB V     PRESTASI YANG DITERIMA .....	43
BAB V     PENUTUP .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, merupakan bagian dari mekanisme dalam system penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran, yang memuat pencapaian terhadap kinerja Dinas mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014.

Secara teknis, penyusunan LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau yang mengacu pada penyusunan LKPj Kepala Daerah kepada DPRD, masih diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau telah menyusun dokumen LKPj Tahun 2017 kepada Bupati Berau sebagai bahan penyusunan LKPj Bupati Berau guna disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau.

Penyusunan LKPj Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017 berpedoman pada indikator (tolak ukur) kinerja yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.

Sedangkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai urusan wajib bukan pelayanan dasar berpedoman pada dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2017.

#### A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017 kepada Bupati Berau adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau ;
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Berau ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

#### B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau ditetapkan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7) ;
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## B.1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- .1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan dalam melaksanakan tugas, Sekretaris membawahkan :

- 2.1. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan asset.

- 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi secretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan dinas.
3. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta prasarana dan sarana kampung.

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahkan :

- 3.1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- 3.2. Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat.
- 3.3. Seksi Prasarana dan Sarana Kampung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat di bidang prasarana dan sarana kampung.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan dan pemasaran hasil usaha serta penerapan kerjasama teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan :

- 4.1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- 4.2. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di bidang pengembangan dan pemasaran hasil usaha.
- 4.3. Seksi Penerapan Kerjasama Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di bidang penerapan kerjasama teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam.
5. Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemerintahan kampung yang meliputi pengelolaan keuangan kampung, fasilitas administrasi pemerintahan kampung serta pengembangan kapasitas pemerintahan kampung.

Bidang Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan Kampung membawahkan :

- 5.1. Seksi Pengelolaan Keuangan Kampung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung di bidang pengelolaan keuangan kampung
- 5.2. Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kampung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung di bidang fasilitasi administrasi pemerintahan kampung.

5.3. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kampung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan kampung.

## B.2. Fungsi

Sesuai pasal 5 Peraturan Bupati Berau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## C. Struktur Organisasi

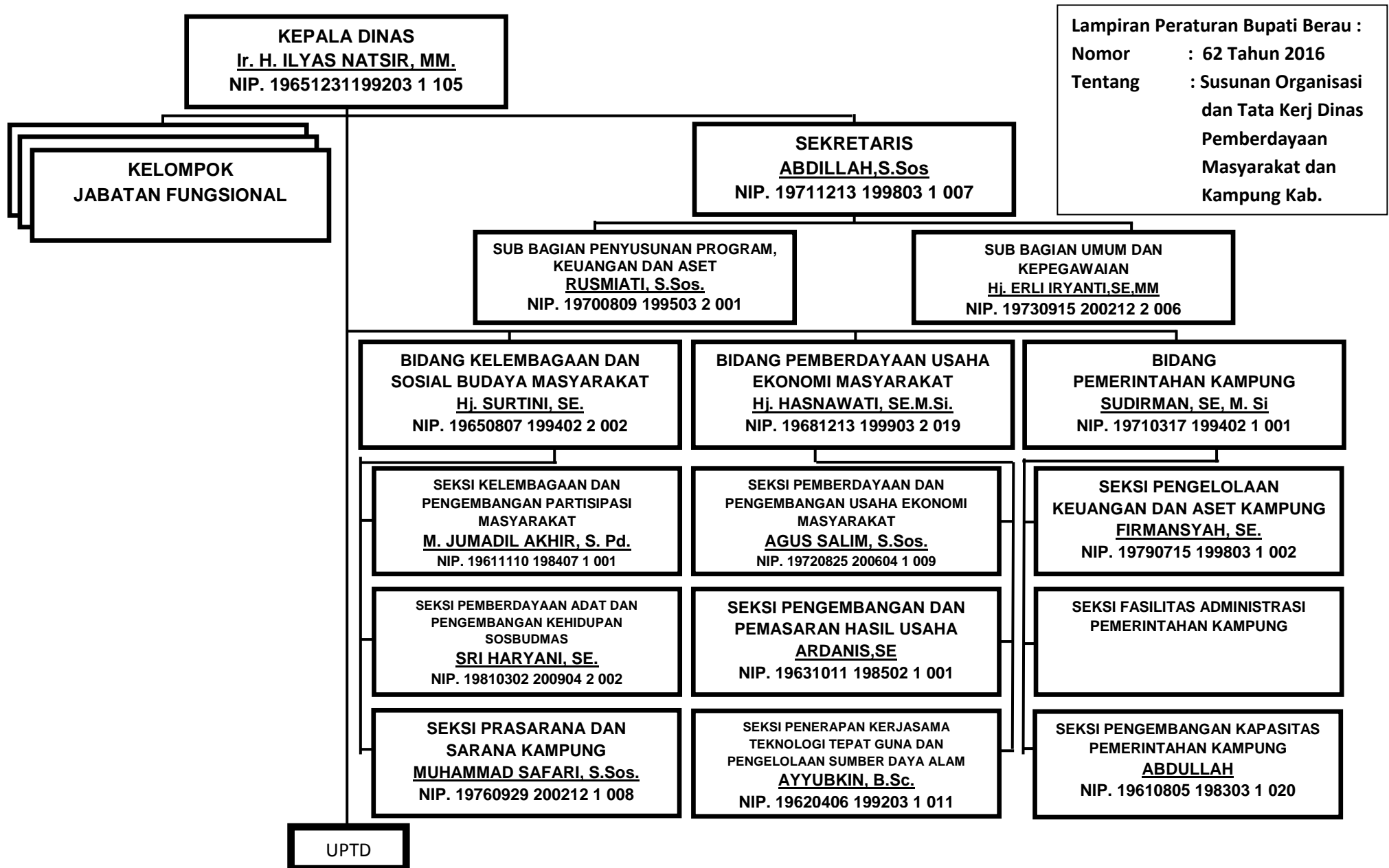
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
  1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
  2. Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
  3. Seksi Prasarana dan Sarana Kampung.

- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
  - 1.Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - 2.Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Usaha;
  - 3.Seksi Penerapan Kerjasama Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- e. Bidang Pemerintahan Kampung / Kelurahan, membawahi :
  - 1.Seksi Pengelolaan Keuangan Kampung;
  - 2.Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kampung;
  - 3.Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kampung.
- f. UPTD;
- g.. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KAB.BERAU



Lampiran Peraturan Bupati Berau :  
 Nomor : 62 Tahun 2016  
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab.

#### D. Daftar Urut Kepangkatan

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau memiliki 40 (empat puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :

1. 1 ( satu ) orang Pejabat Eselon II
2. 4 ( empat ) orang Pejabat Eselon III
3. 10 ( sepuluh ) orang Pejabat Eselon IV
4. 25 ( dua puluh lima ) orang Pelaksana ASN
5. 4 ( empat ) orang PTT

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam Daftar Urut Kepangkatan dapat dilihat sebagai berikut :

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS TAHUN 2017**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN BERAU**  
 Per 31 Desember 2017

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	NIP	Esel on	NO.KAR PEG	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA GOL		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN		JENIS KLMN	USIA
						GOL. RUANG	TMT.GOL	NAMA JABATAN	TMT JABATAN	THN	BLN	JENIS	TAHUN	NAMA PENDIDIKAN	TAHUN LULUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Ir. H. ILYAS NATSIR, MM.	Sila 31/12/1965	19651231199203 1 105	II a	F297914	IV/c	01-03-2015	Kepala DPMK	23-12-2016	28	9	SEPALA/ADU M	1996	IPB BOGOR	2001	L	52
												DIKLATPIM III	2003				
												DIKLATPIM II	2009				
2	ABDILLAH,S.Sos	Watang Pone 13/12/1971	19711213 199803 1 007	III a	I006124	IV/b	01-04-2016	Sekretaris	05-06-2013	18	10	ADUM/PIM IV DIKLATPIM Tk. III	2002	UNMUL	1998	L	46
3	Hj. HASNAWATI, SE, M.Si.	Malimpung 13-12-1968	19681213 199903 2 019	III b	J006463	IV/a	17-02-2014	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	05-10-2017	15	9	DIKLATPIM IV		UNMUL	2013	P	49
												DIKLATPIM III	2016				
4	SUDIRMAN, SE, M. Si	Blitar 17-03-1971	19710317 199402 1 001	III b	G122102	IV/a	01-10-2014	Bidang. Pemerintahan Kampung	03-11-2014	18	9	DIKLAT PIM IV	2003	MAPD IPDN	2009	L	46
												DIKLAT PIM III	2016				
5	Hj. SURTINI, SE.	Bone 07-08-1965	19650807 199402 2 002	III b	G122108	IV/a	01-10-2017	Bidang Kelembagaan dan Sosbud Masyarakat	23-12-2016	26	0	ADUM	2000	STIEM	2005	P	52
														Tg. Redeb			
6	ARDANIS,SE	Sukan 11-10-1963	19631011 198502 1 001	IV a	D 346425	IV/a	01-04-2016	Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Usaha	01-10-2009	28	11	DIKLAT PIM IV	2004	STIEM	2001	L	52
														Tg. Redeb			
7	ABDULLAH	Tanjung Redeb 05-08-1961	19610805 198303 1 020	IV a	C 0857699	III/d	01-04-2007	Seksi Pengembangan Kapasitas Pem. Kampung	23-04-2012	29	10	ADUM	2002	SMEA	1982	L	56
														Tg. Redeb			

LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017

8	M. JUMADIL AKHIR, A.Ma, Pd.	Berau	19611110 198407 1 001	IV a	D. 406508	III/d	01-04-2007	Seksi Kelembagaan & Pengembangan Partisipasi Masyarakat	13-01-2017	28	6	DIKLAT PIM IV	2010	UT SMD	2016	L	56
		10-11-1961															
9.	FIRMANSYAH,SE	Berau	19790715 199803 1 002	IV a	I.006130	III/d	01-04-2014	Seksi. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kamp.	03-11-2014	13	9	DIKLATPIM IV	2010	STIEM	2002	L	38
		15-07-1979												Tg. Redeb			
10.	MUHAMMAD SAFARI, S.Sos.		19760929 200212 1 008	IV a	L. 110471	III/d	01-04-2015	Seksi Prasarana dan Sarana Kampung	13-01-2017	16	9	DIKLATPIM IV	2013	UNMUL	1999	L	41
		29-09-1976															
11.	Hj. ERLI IRYANTI,SE,MM	Manokwari	19730915 200212 2 006	IV a	L 110528	III/d	01-04-2015	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	01-04-2014	14	1	DIKLATPIM IV	2013	UN. 17 Agustus	1997	P	44
		15-09-1973												UNMUL - S2	2002		
12.	AYYUBKIN, B.Sc.	Jeneponto	19620406 199203 1 011	IV a	F. 337254	III/d	01-10-2015	Seksi Penerapan Kerjasama TTG dan Pengelolaan SDA	05-10-2017	23	9	ADUM	1999	D3 Akademi	1986	L	55
		06-04-1962												Koperasi Ujung Pandang			
13.	RUSMIATI, S.Sos.	Berau	19700809 199503 2 001	IV a	G. 198636	III/d	01-10-2015	Kasubbag, Program Program Keuangan dan Aset	13-01-2017	19	10	ADUM	2000	UT SMD	2002	P	47
		09-08-1970															
14.	AGUS SALIM, S.Sos.	Berau	19720825 200604 1 009	IV a	N. 241126	III/c	01-04-2014	Kasubsi. Pemberdayaan dan Pengembangan UEM	13-01-2017	18	7	DIKLATPIM IV	2013	UNMUL	1997	L	45
		25-08-1972															
15.	SRI HARYANI, SE.	Samarinda	19810302 200904 2 002	IV a	5. 542198	III/c	01-04-2017	Kasubsi. Pemberdayaan Adat dan Pengemb Kehidupan Sosbud. Masyarakat	13-01-2017	7	9	-	-	UNMUL	2004	P	36
		02-03-1981															
16.	SRIYANA, SE	Berau	19790120 199803 2 003	-	I. 006154	III/d	01-10-2017	Pelaksana	-	13	10	-	-	STIEM	2003	P	38
		20-01-1979															

LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017

17.	MARLINI, SE	Sambaliung	19770828 199703 2 002	-	G. 471357	III/c	01-04-2015	Pelaksana	-	14	10	-	-	STIEM	2005	P	40
		28-08-1977															
18.	INDRAWATY AGUSTINA, SE	Tanjung Redeb	19770817 200701 2 016	-	N. 354969	III/c	01-04-2015	Pelaksana	-	14	4	-	-	UWGM	2000	P	40
		17-08-1977															
19.	H. EDY GUNA BHAKTI, SE	Tanjung Redeb	19790314 200701 1 008	-	N. 354961	III/c	01-04-2015	Pelaksana	-	11	9	-	-	STIEM	2001	L	36
		14 - 03 - 1979															
20.	IDA ROYANI, SE	Gunung Tabur	19730912 199803 2 007	-	J. 064008	III/c	01-04-2016	Pelaksana	-	16	10	-	-	STIEM	2006	P	44
		12-09-1973															
21.	SABARIAH, S.Sos.	Bone	19800603 200901 2 002	-	P 533711	III/b	01-04-2017	Pelaksana	-	8	11			UNIV.	2003	P	37
		03-04-1980												WIDYAGAMA			
22.	RINI PUDJIASTUTI, ST	Banyuwangi	19771205 200904 2 001	-	P533779	III/b	01-04-2017	Pelaksana	-	6	8	-	-	UII	2001	P	38
		05-12-1977															
23.	DWI DESLIANA, SE	Berau	19781228 201001 2 008	-	Q202348	III/b	01-04-2014	Pelaksana	-	12	10	-	-	UWGM	2002	P	39
		28-12-1978															
24.	AMOS KIDING, S. Pd	Tana Toraja	19760915 201001 1 009	-	Q202205	III/b	01-04-2014	Pelaksana	-	12	2	-	-	UNHAS	2000	L	41
		15-09-1976															
25.	INDAH SURYANI, SE	Surabaya	19790124 201001 2 017	-	Q220204	III/b	01-04-2014	Pelaksana	-	6	12	-	-	UNRAM	2002	P	36
		24-01-1979															
26.	SYARIFUDDIN NOOR, S.Sos, M.Si	Tanjung Redeb	19840307 201001 1 009	-	Q202345	III/b	01-04-2014	Pelaksana	-	6	12	-	-	UNMUL	2008	L	32
		07-05-1984															
27.	EKA LINIARTY, SE	Tanjung Redeb	19801215 201001 2 019	-	Q202347	III/b	01-04-2014	Pelaksana	-	5	12	-	-	UNMUL	2003	P	35

LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017

		15-12-1980															
28.	TUTIK WIDHIYARSIH, SE	Tanjung Redeb	19750520 199603 2 004	-	G. 352185	III/b	01-04-2015	Pelaksana	-	15	10	-	-	SMEA	1993	P	40
		20-05-1975															
29.	RICKY PRATAMA, ST	Samarinda	19830419 201101 1 006	-	B. 0800202	III/b	01-04-2015	Pelaksana	-	6	12	-	-	IST AKPRIND	2010	L	32
		19-04-1983															
30.	D. HADI HARTONO, SE.	Berau	19720727 200801 1 012	-	P155527	III/a	01-04-2014	Pelaksana	-	8	4	-	-	STM	1992	L	43
		27-07-1972															
31.	YUDHA SALISTHIA, S.STP	Tanjung Redeb	19921006 201507 1 001	-	B 00012230	III/a	01-07-2015	Pelaksana	-	2	5	-	-	IPDN	2015	L	25
		06-10-1992															
32.	RAHMAWATI KATILI, S.IP.	Gorontalo	19930322 201507 2 001	-	B. 00012936	III/a	01-07-2015	Pelaksana	-	2	5	-	-	IPDN	2015	P	24
		22-03-1993															
33.	ARIF SANJAYA, S.STP	Bima	19940906 201609 1 001	-	-	III/a	01-10-2016	Pelaksana	-	1	3	-	-	IPDN	2016	L	23
		06-09-1994															
34.	DANU SAPUTRA, A.Md.	Berau	19760219 200901 1 001	-	P 416055	III/A	01-04-2017	Pelaksana	-	16	4	-	-	D3 - Hut	1997	L	41
		19-02-1976															
35.	AGUS ERWIN	Tanjung Redeb	19720806 200212 1 009	-	L. 161390	II/d	01-04-2015	Pelaksana	-	13	1	-	-	DIV	2013	L	43
		06-08-1972															
36.	BAMBANG SUBAGIONO	Teluk Bayur	19761001 200701 1 019	-	N. 365326	II/c	01-04-2015	Pelaksana	-	15	5	-	-	SMA	1995	L	39
		01-10-1976															

LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017

37.	Z A K A R I A	Gunung Tabur	19820416 200801 1 013	-	P. 414788	II/c	01-04-2016	Pelaksana	-	13	4	-	-	SMA	2001	L	33
		16-04-1982															
38.	ARMANIANSYAH	Tanjung Redeb	19791111 200701 1 011	-	N355171	II/c	01-04-2016	Pelaksana	-	9	1	-	-	SMA	1997	L	36
		11-11-1979															
39.	MILI HENDRAYANTI	Tanjung Redeb	19820421 200901 2 003	-	P 533652	II/b	01-10-2017	Pelaksana	-	4	1	-	-	SMU IPS	2000	P	34
		21-04-1982															
40.	IRPAN WAHYUDI	Derawan	19810922 201001 1 016	-	Q. 244744	II/a	01-01-2010	Pelaksana	-	5	12	-	-	SMK	2000	L	36
		22-09-1981															

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Daftar Urut Kepangkatan dan Sistematika Penulisan

### BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA DPMK Kabupaten Berau, Program Prioritas DPMK Kabupaten Berau dan Realisasi Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA DPMK Kabupaten Berau dan Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas DPMK Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau.

### BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN

Bab ini memuat tentang Tugas Perbantuan yang Diterima dan Tugas Perbantuan yang Diberikan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Bab ini memuat tentang Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

### BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Bab ini memuat tentang prestasi dan penghargaan yang telah diterima oleh DPMK Kabupaten Berau selama Tahun 2017.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang Kesimpulan dan Saran

## BAB II

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 baik yang telah disusun pada awal tahun pelaksanaan Renstra maupun yang telah mengalami Revisi.

A. Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Sesuai Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau  
Tahun 2017

	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.467.816.000</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>938.402.000</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.174.000
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	135.000.000
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	106.207.000
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.500.000
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.520.000
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
	11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.796.000
	12. Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000

	13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	190.000.000
	14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	144.305.000
	15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	131.400.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.000.000</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>472.974.000</b>
	1. Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	99.660.000
	2. Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	73.314.000
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Data Profil Kampung/Desa dan Kelurahan	200.000.000
	4. Pengembangan Sistem Aplikasi Perdesaan Online	100.000.000
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>150.000.000</b>
	1. Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Manajemen BUMK	150.000.000
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>3.071.440.000</b>
	1. Pemilihan, Pelantikan dan Pembinaan Kepala Desa/Kampung	2.422.160.000
	2. Pelaksanaan KKN Mahasiswa	
	3. Pelaksanaan Lomba Kampung dan Kelurahan	98.280.000
	4. Pemekaran Kampung	206.000.000
	5. Penyusunan Kebijakan dan Validasi Dana ADD/ADK	50.000.000
	6. Fasilitasi dan Pendamping Desa/Kampung	70.000.000
	7. Peningkatan Kualitas SDM Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	75.000.000
	8. Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Keuangan Kampung	100.000.000
		50.000.000
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>330.000.000</b>
	1. Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa/Kampung	50.000.000
	2. Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung (ADK)	100.000.000
	3. Penyusunan dan Regulasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	30.000.000
	4. Verifikasi dan Penyelarasan RPJMK	150.000.000
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</b>	<b>1.500.000.000</b>
	1. Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan PKK	1.500.000.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Adapun capaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan tertuang dalam DPPA untuk masing-masing Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

## 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdapat di Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pengurus kelembagaan dengan tujuan agar lembaga pemberdayaan masyarakat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, dan hubungan kerja lembaga pemberdayaan masyarakat dengan Pemerintahan Kampung/Desa berjalan harmonis, sebagai kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu :

### 1.1. Kegiatan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (15.04)

Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2017 dilaksanakan di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga yang ada. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat Kampung dalam pembangunan terutama di bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan agama serta bidang lingkungan hidup.

#### a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 99.660.000,00 dan realisasi Rp.99.220.000,00 (99,56%),

- Keluaran (output)

Output kegiatan yaitu terlaksananya bulan bhakti gotong royong dengan target 1 kali kegiatan dan realisasi 1 kali, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 100%

- Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu meningkatnya kesadaran gotong royong masyarakat dengan target 100% dan terealisasi 100%

#### b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan sinergitas kelembagaan dan nilai sosial budaya masyarakat kampung/desa dengan target kinerja 100% dan tingkat capaian 100%

1.2. Kegiatan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( 15.06 )

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis masyarakat terutama aparat Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang ada di Kecamatan harus terus di laksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali diri dan lingkungannya sehingga menjadi mandiri dalam kehidupannya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pelatihan LPM Tahun 2017 diikuti oleh 40 LPM/KPM yang ada di daerah terdekat.

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

• Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 73.314.000,00 dan realisasi Rp.46.865.550,00 (63,92%)

• Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah pengurus LPM dan KPM yang terlatih dengan target 70 orang dan realisasi 40 orang maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 57,14%. Keluaran tidak sesuai target karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk mengundang lembaga dari kecamatan jauh.

• Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu terlatihnya pengurus LPM dan KPM dengan target 100 % dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan sinergitas kelembagaan dan nilai sosial budaya masyarakat kampung/desa dengan target kinerja 100% dan tingkat capaian 100%

1.3. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Profil Kampung /Desa dan Kelurahan ( 15.08 )

Maksud dan tujuan penyusunan profil desa/kelurahan untuk menyediakan data dan informasi primer yang relevan, valid serta komprehensif sebagai rujukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Sampai dengan semester II telah terinput sebanyak 29 (duapuluh sembilan) Kampung/Kelurahan dan masih ada 81 (delapan puluh satu) Kampung/Kelurahan yang belum tersedia data profilnya.

Adapun data profil yang telah terinput adalah sebagai berikut :

No	Kampung	Kecamatan
1.	Ampen Medang	Batu Putih
2.	Sumber Agung	Batu Putih
3.	Pantai Harapan	Biduk-Biduk
4.	Tanjung Perepat	Biduk-Biduk
5.	Biatan Bapinang	Biatan
6.	Biatan Ilir	Biatan
7.	Bukit Makmur Jaya	Biatan
8.	Karangan	Biatan
9.	Manunggal Jaya	Biatan
10.	Birang	Gunung Tabur
11.	Maluang	Gunung Tabur
12.	Merancang Ilir	Gunung Tabur
13.	Merancang Ulu	Gunung Tabur
14.	Tasuk	Gunung Tabur
15.	Mapulu	Kelay
16.	Merabu	Kelay
17.	Sido Bangen	Kelay
18.	Pulau Derawan	Pulau Derawan
19.	Tanjung Perangat	Sambaliung
20.	Bukit Makmur	Segah
21.	Harapan Maju	Tabalar
22.	Semurut	Tabalar
23.	Gayam	Tanjung Redeb
24.	Capuak	Talisayan
25.	Dumaring	Talisayan
26.	Suka Murya	Talisayan
27.	Sumber Mulya	Talisayan
28.	Labanan Jaya	Teluk Bayur
29.	Labanan Makarti	Teluk Bayur

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Sosbudmasy DPMK

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )  
Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 200.000.000,00 dan realisasi Rp.181.807.281,00 (90,90%)
- Keluaran (output)  
Output kegiatan yaitu jumlah profil kampung/kelurahan yang tersusun menjadi dokumen dengan target 100 kampung dan realisasi 29 kampung maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 29%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana yang diberikan dan lambatnya penyampaian data dari kampung sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal.
- Hasil (outcome)  
Outcome dalam kegiatan yaitu tersedianya data profil kampung/kelurahan yang akurat dengan target 100 % dan terealisasi 100 %

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan sinergitas kelembagaan dan nilai sosial budaya masyarakat kampung/desa dengan target kinerja 100 % dan tingkat capaian 100%

1.4. Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Perdesaan Online (15.13)

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan pelatihan kepada kampung-kampung untuk penerapan aplikasi ini dengan narasumber dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI diikuti oleh 108 orang yang telah mengisi dan telah menyerahkan kembali kuisisioner Indeks Membangun Desa.

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )  
Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp.87.402.213,00 (87,40%)

- Keluaran (output)  
Output kegiatan adalah tercapainya pemahaman kepala kampung/desa akan pentingnya IDM sebagai pendukung aplikasi desa online dengan target 100 kampung dan realisasi 54 kampung maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 54%
  - Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu terwujudnya system informasi desa/kampung melalui aplikasi desa online dengan target 100 % dan terealisasi 100%
- b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran
- Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan sinergitas kelembagaan dan nilai sosial budaya masyarakat kampung/desa dengan target kinerja 100 % dengan tingkat capaian 100%

## 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kampung/Desa

Program pengembangan lembaga ekonomi kampung/desa ini terdapat pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu :

### 2.1. Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Manajemen BUMK (16.08)

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas manajemen BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) terdapat beberapa Kampung yang telah mendapatkan pendampingan BUMK pada Tahun 2017 sebanyak 18 Kampung yaitu :

No	Kampung	Kecamatan	Ket
1	Tumbit Dayak	Sambaliung	
2	Pegat Bukur	Sambaliung	
3	Tanjung Perangat	Sambaliung	
4	Sukan Tengah	Sambaliung	
5	Sei Bebanir Bangun	Sambaliung	
6	Samburakat	Gunung Tabur	
7	Maluang	Gunung Tabur	
8	Teluk Harapan	Maratua	

9	Payung-Payung	Maratua	
10	Pandan Sari	Segah	
11	Bukit Makmur	Segah	
12	Labanan Makmur	Teluk Bayur	
13	Tumbit Melayu	Teluk Bayur	
14	Pulau Derawan	Pulau Derawan	
15	Buyung-Buyung	Tabalar	
16	Semurut	Tabalar	
17	Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	
18	Tembudan	Batu Putih	

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan UEM DPMK

Sedangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang telah terbentuk sepanjang Tahun 2017 sebanyak 19 Kampung sebagai berikut :

No	KAMPUNG	KECAMATAN	JENIS USAHA
1	2	3	4
1	Sumber Mulia	Talisayan	Perkebunan
2	Capuak	Talisayan	Pengelolaan sarang walet
3	Bumi Jaya	Talisayan	Jasa konstruksi
4	Tunggal Bumi	Talisayan	Penyewaan alat
			Pariwisata
			Swasembada pertanian
5	Sumber Agung	Talisayan	Pengelola air bersih
			Tempat pendaratan ikan
			Home industry
			Pertanian dan perkebunan
			Transportasi pariwisata
6	Pilanjau	Sambaliung	Pengelolaan sarana air bersih
			Kios Desa
7	Sei Bebanir Bangun	Sambaliung	Pasar Desa
			Pengelolaan Wisata
8	Tumbit Dayat	Sambaliung	Jasa

9	Teluk Semanting	Pulau Derawan	Pengelolaan PLTS Komunal
			Kerupuk dan amplang
			Ekowisata mangrove
10	Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	Pengelolaan wisata Labuan cermin
			Pengelolaan pabrik es
			Pengelolaan dermaga
11	Teluk Sulaiman	Biduk-Biduk	Pengelolaan pabrik es
			Penyewaan tarub
12	Batu-Batu	Gunung Tabur	Pertanian dan perkebunan
			Perikanan
			Wisata mangrove
			Perdagangan
13	Tasuk	Gunung Tabur	Usaha penyewaan
			Bank sampah
			Pamsimas
			Pasar desa
			Jasa keuangan
14	Teluk Alulu	Maratua	Pengelolaan pabrik es desa
			Pengelolaan minyak kelapa
			Wisata
15	Payung-Payung	Maratua	Pengelolaan pariwisata
			Perikanan
			Simpan pinjam
16	Bukit Makmur	Segah	Pengelolaan sarana air bersih
			Pengelolaan hasil perkebunan
			Jasa
17	Tepian Buah	Segah	Pengelolaan wisata air terjun tembalang
18	Merabu	Kelay	Ecolodge/hunian wisatawan
19	Tabalar Muara	Tabalar	Jasa

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan UEM DPMK

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 150.000.000,00 dan realisasi Rp.139.058.993,00 (92,71%)

- Keluaran (output)  
Output kegiatan adalah jumlah BUMK yang difasilitasi dengan target 20 kampung dan realisasi 19 kampung, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 95%
  - Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu terciptanya manajemen BUMK yang baik dengan target 100% dan terealisasi 100%
- b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran
- Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya keberdayaan dan jejaring usaha ekonomi masyarakat dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

### 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka program partisipasi masyarakat dalam membangun adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan kampung untuk kepentingan pembangunan di kampung. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang melibatkan 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan UEM dan Bidang Pemerintahan Kampung sebagai berikut :

#### 3.1. Kegiatan Pemilihan, Pelantikan dan Pembinaan Kepala Kampung (17.06)

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Kampung serentak di wilayah Kabupaten Berau yang telah habis masa jabatannya. Pemilihan Kepala Kampung serentak adalah untuk masa jabatan 6 tahun ( 2017 – 2023 ) awalnya akan diikuti sebanyak 56 Kampung yaitu :

No	Kecamatan	Kampung	Kepala Kampung terpilih
1	Kelay	Merapun	Daring
2		Long Keluh	Maikel
3		Merabu	Agustinus
4		Panaan	Samsuri
5		Muara Lesan	Nanang
6		Merasa	Yafet
7		Lesan Dayak	Yusrianto
8		Long Beliu	Benyamin

9		Long Duhung	Wesly
10		Long Lamcin	Pitar Markus
11		Lond Pelay	Oktavianus
12		Long Suluy	-
13		Mapulu	-
14	Talisayan	Talisayan	Yamsir
15		Dumaring	Salehuddin
16		Purnasari Jaya	Sugiono
17		Eka Sapta	Syamsul Arifin
18		Campur Sari	Silfanuddin
19		Tunggal Bumi	Mugiono
20	Sambaliung	Tumbit Dayak	Jiang Bos
21		Pesayan	Rahmansyah
22		Bena Baru	Leth Anye
23		Long Lanuk	Solaiman
24		Gurimbang	Madri Pani
25		Sukan Tengah	Bunyamin
26	Segah	Long Ayap	Katben
27		Punan Mahkam	Unyai Jalnan
28		Gunung Sari	M. Tummin
29		Harapan Jaya	Ali Sasmirul
30		Tepian Buah	Surya Emi Susianthi
31		Siduung Indah	Eli Amos D
32		Batu Rajang	Bit
33		Punan Segah	-
34	Gunung Tabur	Merancang Ulu	Marpal
35		Merancang Ilir	Rizal
36	Biduk-Biduk	Pantai Harapan	Abdullah A
37		Tanjung Perepat	Yandi Kurniawan
38	Teluk Bayur	Tumbit Melayu	Maspri
39		Labanan Jaya	Rohmat Kholis
40		Labanan Makmur	Mupit Datusahlan.S.Si.M.Sc
41		Labanan Makarti	Mudawi
42	Tabalar	Harapan Maju	Agus

43		Tabalar Muara	Jalaludddin
44		Tabalar Ulu	Sukrisno
45		Tuba'an	Syaiful Achyar
46	Maratua	Muara Bohe Silian	Jokson
47		Muara Teluk Alulu	Ali Hanafiah
48	Biatan	Karangan	Muhammad Rapi
49		Biatan Ulu	Suharto
50		Biatan Bapinang	Heberly
51	Pulau Derawan	Pulau Derawan	H. Bahri HB
52		Kasai	Muhammad Jais
53		Teluk Semanting	Abdul Gani
54	Batu Putih	Batu Putih	H. Krisdianto
55		Tembudan	Nur Iman
56		Sumber Agung	Edy Santoso

Sumber Data : Bidang Pemerintahan Kampung DPMK

Tetapi pada saat pelaksanaan pemilihan hanya diikuti oleh 54 kampung karena 3 kampung yaitu Kampung Long Suluy dan Kampung Punan Segah sampai menjelang pemilihan hanya ada 1 calon tunggal, sementara Kampung Mapulu juga tidak bisa mengikuti karena masih adanya permasalahan batas wilayah dengan Kampung Merapun.

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 2.422.160.000,00 dan realisasi Rp.2.375.975.200,00 (98,09)

- Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah terlaksananya pemilihan, pelantikan dan pembinaan kepala kampung dengan target 56 kampung dan realisasi 54 kampung, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 94,64%.

- Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu jumlah kepala kampung terpilih secara demokratis sesuai pemilihan dengan target 56 kampung dan terealisasi 54 kampung

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.2. Kegiatan Pelaksanaan KKN Mahasiswa ( 17.08 )

Pelaksanaan KKN Mahasiswa pada Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Agustus yang diikuti oleh 325 orang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur yaitu :

- Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau (20 orang)
- Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Berau (58 orang) dan
- Universitas Mulawarman Samarinda (247 orang)

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

• Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 98.280.000,00 dan realisasi Rp. 65.328.000,00 (66,47%)

• Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah kampung penerima mahasiswa KKN dengan target 57 kampung dan realisasi 57 kampung, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 100%.

• Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu terlaksananya KKN Mahasiswa di kampung dan kecamatan dengan target 100% dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.3. Kegiatan Pelaksanaan Lomba Kampung dan Kelurahan ( 17.10 )

Lomba kampung dan kelurahan dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, mengetahui tingkat

kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada seluruh Camat yang ada di 12 Kecamatan dan Kelurahan sampai saat menjelang penilaian hanya 6 Kecamatan dan yang menyampaikan perwakilan dan 1 kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Biatan diwakili Kampung Biatan Ilir
2. Kecamatan Talisayan diwakili Kampung Sumber Mulya
3. Kecamatan Biduk-Biduk diwakili Kampung Giring-Giring
4. Kecamatan Gunung Tabur diwakili Kampung Maluang
5. Kecamatan Teluk Bayur diwakili Labanan Jaya
6. Kecamatan Segah diwakili Kampung Bukit Makmur

Yang menjadi pemenang/juara yaitu :

Juara Pertama Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk dan menjadi juara Ketiga pada Tingkat Provinsi

Juara Kedua Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur

Juara Ketiga Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan.

Sedangkan untuk perlombaan tingkat Kelurahan hanya diwakili oleh satu Kelurahan saja yaitu Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb dan menjadi juara I Tingkat Kelurahan

Diinformasikan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau satu tahunan sebagaimana tersebut tidak didukung dengan anggaran kegiatan yang semestinya, ada kegiatan khusus dalam penilaian Sistem Kinerja, tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau berupaya memberikan target kinerja melalui kegiatan Lomba Kampung berprestasi, melalui kegiatan tersebut dapat di simpulkan dan di beri penilaian bahwa Kampung yang mempunyai SAKIP yang baik yaitu kampung yang mendapat Juara Lomba Kampung yaitu : Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur dan Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan.

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 206.000.000,00 dan realisasi Rp.196.030.800,00 (95,16%)

- Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah terlaksananya lomba kampung dan kelurahan dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 100%

- Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu terpilihnya juara lomba kampung dan kelurahan dengan target 6 kampung dan terealisasi sebanyak 3 kampung atau 50%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.4. Kegiatan Pemekaran Kampung ( 17.11 )

Kegiatan pemekaran berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai adalah dengan adanya 2 kampung yang akan dibentuk yaitu di Kecamatan Segah dan Kelay

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp.38.130.000,00 (76,26)

- Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah kampung yang dimekarkan dengan target 2 kampung dalam melaksanakan kegiatan ini hanya dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh mengenai pemekaran kampung, sehingga tingkat capaiannya adalah 0 kampung

- Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu jumlah kampung bertambah pelayanan lebih singkat dan mudah dengan target 100% dan karena keterbatasan waktu belum terealisasi ( baru tahap sosialisasi )

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.5. Kegiatan Penyusunan dan Validasi Data Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) ( 17.12 )

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

• Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 70.000.000,00 dan realisasi Rp.66.617.410,00 (95,17%)

• Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah regulasi ADK dan data dasar ADK dengan target 10 regulasi dan realisasi 6 regulasi, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 60%

• Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu tersusunnya dokumen regulasi dan validasi data ADK dengan target 100% dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.6. Kegiatan Fasilitasi dan Pendamping Desa/Kampung ( 17.14 )

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

• Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 75.000.000,00 dan realisasi Rp.62.342.000,00 (83,12)

• Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah aparatur pendamping desa/kampung yang dibina dengan target 90 orang dan realisasi 45 orang, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 50%

• Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu terlatihnya aparatur pendamping desa/kampung dengan target 100% dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.7. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) ( 17.17 )

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Saat ini jumlah Posyantek yang sudah terbentuk di 5 Kecamatan, sesuai dengan indikator kinerja jumlah Posyantek yang terbentuk di Kecamatan dan yang aktif capaian kinerja pada sasaran ini tercapai 100%.

Sedangkan binaan jumlah produk TTG yang dimanfaatkan di masyarakat pada Tahun 2017 antara lain :

1. Kecamatan Sambaliung

- Alat untuk membersihkan/menyikat kulit kerang dalam jumlah banyak
- Alat penghancur kulit kerang, kulit kerang yang sudah dibersihkan/disikat kemudian dijadikan tepung untuk campuran makanan ternak
- Alat pembakar ikan/ayam/jagung yang dibawahnya terdapat kipas yang bisa disetel kekencangan anginnya dengan bahan bakar briket sehingga mengurangi asap pada proses pembakaran berlangsung
- Alat pembersih daur ulang berbahan plastic, seperti bekas botol air mineral, minuman gelas dan sampah plastik lainnya

2. Kecamatan Teluk Bayur

- Alat pemipil dan pembuat tepung jagung yang digunakan sebagai makanan ternak
- Mini cooper pencacah rumput dan sayur buat ungags atau ternak sapi dan kambing
- Pakan unggas organic fermentasi, bahan baku ampas tahu, dedak dan tepung ikan

3. Kecamatan Pulau Derawan

- Kerajinan tangan berupa bunga yang terbuat dari pelepah dan buah pohon pinang yang sudah kering
- Kerajinan tangan dari tempurung kelapa dan kulit kerang

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp.61.468.500,00 (61,47%)

- Keluaran (output)

Output kegiatan adalah terbentuknya lembaga posyantek di kecamatan dengan target 4 lembaga dan realisasi 5 lembaga, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 125%

- Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan dan supervise posyantek dengan target 100% dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

3.8 Kegiatan Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Keuangan Kampung ( 17.19 )

Kegiatan ini adalah mengawal dan mendampingi kampung dalam hal pengelolaan keuangan kampung atau desa dengan melibatkan Tim dari Kejaksaan.

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp.34.087.000,00 (68,17%)

- Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah kecamatan/kampung dengan target 100% dan realisasi 100%

- Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu berkurangnya kendala yang memungkinkan terjadi terkait keterlambatan penyampaian LPJ keuangan kampung dengan target 100% dan terealisasi 100%
  - b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran  
Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan kampung dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 4.1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa/Kampung ( 18.05 )  
Dalam kurun waktu Tahun 2017 telah dilaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penyusunan RPJMK kepada 15 (lima belas) Kampung terutama yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung serentak yaitu antara lain :
1. Kecamatan Gunung Tabur meliputi Kampung Merancang Ilir, Kampung Pulau Besing dan Kampung Melati Jaya.
  2. Kecamatan Pulau Derawan meliputi Kampung Pegat Batumbuk, Kampung Teluk Semanting dan Kampung Tanjung Batu.
  3. Kecamatan Tabalar meliputi Kampung Harapan Maju , Kampung Tabalar Ulu dan Kampung Tabalar
  4. Kecamatan Kelay meliputi Kampung Merasa, Kampung Muara Lesan dan Kampung Long Beliu
  5. Kecamatan Segah meliputi Kampung Tepian Buah, Kampung Harapan Jaya dan Kampung Gunung Sari
- Untuk Kampung lainnya belum bisa di laksanakan sosialisasi karena keterbatasan anggaran.
- a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan
  - Masukan ( input )  
Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp.33.207.600,00 (66,41%)

- Keluaran (output)  
Output kegiatan adalah jumlah kampung yang terfasilitasi penyusunan RPJM Kampung dengan target 15 kampung dan realisasi 15 kampung, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 100%
- Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu tersusunnya RPJM Kampung dengan baik dengan target 100% dan belum terealisasi karena kegiatan difokuskan pada memfasilitasi kampung dalam penyusunan RPJMK.

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

4.2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung ( 18.07 )

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )  
Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp.87.271.662,00 (87,27%)
- Keluaran (output)  
Output kegiatan adalah jumlah kampung yang dibina dengan target 100% dan realisasi 100%
- Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu terealisasinya dana kampung/desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target 100% dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

4.3. Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ( 18.09 )

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )  
Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 30.000.000,00 dan realisasi Rp.29.587.500,00 (98,63%)
- Keluaran (output)  
Output kegiatan adalah terbitnya rancangan Perda/Perbup/SK Bupati dan tersosialisasikannya regulasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung dengan target 100% dan realisasi 100%
- Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur kampung tentang regulasi pemberdayaan masyarakat pemerintahan kampung dengan target 5 regulasi dan terealisasi 5 regulasi maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

4.4. Kegiatan Verifikasi dan Penyelarasan RPJMK ( 18.17 )

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )  
Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 150.000.000,00 dan realisasi Rp.91.825.913,00 (61,22%)
- Keluaran (output)  
Output kegiatan adalah tercapainya pemahaman pemerintah kampung dalam penyelarasan RPJMK dengan target 100% (100 kampung) dan realisasi 11% (11 kampung)
- Hasil (outcome)  
Outcome kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan desa/kampung dengan baik dengan target 100% dan terealisasi 100%

## b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

## 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sejak Tahun 2016. Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

## 5.1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan PKK ( 19.02 )

Kegiatan ini mengarah pada pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan PKK Kabupaten ke wilayah Kecamatan dan Kampung. Adapun kegiatan PKK yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	Ket
1	Pembinaan Iman dan Takwa	3 Kec	Pokja I	
2	Pembinaan Mental	5 Kec		
3	Sosialisasi Pola Asuh	Kec. Sambaliung dan Teluk Bayur		
4	Tarhib Ramadhan	Kec.Tanjung Redeb		
5	Sosialisasi Jarwasnaba (Jaringan Remaja Waspada Narkoba)	Kec.Batu Putih		
6	Pembinaan dan Pembentukan Koperasi	13 Kec	Pokja II	
7	Pembinaan dan Pemetaan UP2K	13 Kec		
9	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	1 Kali	Pokja III	
10	Pelatihan Memasak Kudapan	2 Kec		
11	Lomba Hatinya PKK	13 Kec		
12	Lomba Posyandu	13 Kec	Pokja IV	
13	Lomba PHBS	13 Kec		
14	Lomba KB Kes	4 Kec		
15	Rapat Kerja	1 Kali	Kesekretariatan	
16	HKG Tingkat Kab.Berau	1 Kali		
17	HKG Tingkat Prov.Kaltim	1 Kali		
18	SMEP (Suvervisi,Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)	13 Kec		
19	Temu Kader Dasawisma	1 Kali		
20	Pelatihan Manajemen Organisasi	1 Kali		
21	Pelatihan Pengolahan Tepung Berbahan Ubi Jalar di Malang	1 Kali		
22	Workshop TP PKK Prov. Kaltim di Semarang	1 Kali		
23	Peringatan Hari Ibu Th 2017	1 Kali		

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

- Masukan ( input )

Input kegiatan yaitu dana sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 dan realisasi Rp.1.324.400.775,00 (88,29%)

- Keluaran (output)

Output kegiatan adalah jumlah terfasilitasinya lembaga PKK dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan target 100 PKK dan realisasi 100 PKK, maka berdasarkan rumusan tingkat capaiannya adalah 100%

- Hasil (outcome)

Outcome kegiatan yaitu aktifnya peran PKK Kabupaten dan Kampung/ Desa dengan target 100% dan terealisasi 100%

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dituju dalam kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas dan sinergitas kelembagaan dan nilai sosial budaya masyarakat kampung/desa dengan target kinerja 100% dengan tingkat capaian 100%

C. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Realisasi Tahun 2017 berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun. Akan tetapi berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2016 ada beberapa Program yang menjadi prioritas yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Realisasi Tahun 2017  
berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi Tahun 2017
			2017	2021		
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah LPM berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100	100	DPMK	80
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat kampung yang aktif (unit usaha)	99	584	DPMK	110
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase kampung yang mampu menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai peraturan	56	56	DPMK	12
4	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase panjang jalan desa/ kampung yang berkondisi baik/ layak (persen)	68,4	85	DPU/ DPMK	0

D. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016–2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau pada Tahun 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 6.467.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.846.610.267,00 atau 90,40% dengan melaksanakan 5 Program Prioritas berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan berdasarkan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator kinerja yaitu jumlah LPM yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan berdasarkan target kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai sebanyak 100 LPM dan realisasinya mencapai 80 lembaga dengan alokasi dana Rp. 472.974.00000 dan terealisasi Rp.415.295.044,00 atau mencapai 87,81%

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong
2. Pelatihan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Profil Kampung/Desa dan Kelurahan
4. Pengembangan Sistem Aplikasi Online

- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan indikator kinerja jumlah usaha ekonomi produktif masyarakat kampung yang aktif berdasarkan target kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai sebanyak 99 unit usaha dan realisasinya mencapai 110 unit usaha dengan alokasi dana Rp.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.139.058.993,00 atau mencapai 92,71%

Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Manajemen BUMK

- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan indikator kinerja Persentase kampung yang mampu menyusun RPJMDes, RKPDDes dan APBDes sesuai peraturan berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai 56% dan terealisasi 12% dengan alokasi dana Rp.370.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.241.892.875,00 atau mencapai 75,30%.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa/Kampung
2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung (ADK)
3. Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan indikator kinerja persentase panjang jalan desa/kampung yang berkondisi baik/layak dengan target kinerja 68,4.

Program ini tidak pernah dialokasikan atau dianggarkan dan tidak pernah diusulkan baik itu dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan sehingga tidak bisa merealisasikan capaian target.

#### E. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2017 antara lain :

1. Pelatihan bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung harus dilaksanakan secara terus menerus tetapi belum didukung dengan anggaran yang tersedia.
2. Belum optimalnya pemahaman aparatur dan lembaga yang ada di kampung/desa terutama dalam hal pengelolaan dana desa.
3. Kurang pemahaman sistem kinerja program kegiatan yang dilaksanakan, berdampak langsung terhadap kurang maksimal bagi pejabat eselon III dan IV dalam memberikan dukungan data kuantitatif atas laporan hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Tidak meratanya anggaran yang disediakan untuk masing-masing program/kegiatan.
5. Fasilitas sarana jaringan pendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kampung belum sepenuhnya terpenuhi
6. Sumber daya manusia yang ada di kampung belum memadai untuk menyusun langsung RPJMK tanpa pendampingan sehingga antara RPJMK dengan RPJMD belum ada sinkronisasi

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

1. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan keuangan desa dan kelembagaan di desa.
2. Mengimplementasikan bimtek/pelatihan/study pembelajaran yang telah diikuti bagi pejabat, guna mencapai target rencana program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
3. Melaksanakan penguatan tugas dan fungsi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau khususnya pejabat Eselon dalam hal capacity building aparatur yang di laksanakan pihak ketiga
4. Memfasilitasi pemerataan pembagian anggaran kegiatan pembinaan ke kampung-kampung untuk masing-masing program/kegiatan.
5. Sistem informasi desa/kampung yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kampung harus memberikan akses kepada masyarakat desa/kampung dan pemangku kepentingan
6. Pentingnya ada pendampingan untuk penyusunan RPJMK dengan membentuk suatu Tim untuk memantau langsung penyusunan RPJMK agar dapat disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Berau

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN

Tugas perbantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat di desentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian tugas perbantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sedangkan pendanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas perbantuan di daerah dibebankan kepada APBN.

Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 bahwa pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Desa didanai dari APBN melalui dana tugas perbantuan. Pendanaan dalam rangka tugas perbantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai asset pemerintah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas perbantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Ditjen melalui Kementerian Keuangan RI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau tidak mendapatkan alokasi untuk urusan tugas perbantuan ini baik tugas perbantuan yang diterima maupun tugas perbantuan yang diberikan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan kerja sama antar daerah, pihak ketiga dan dengan instansi vertikal di daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau tidak ada menyelenggarakan kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga maupun koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

## BAB V

### PRESTASI YANG DITERIMA

Prestasi dinas adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan dan diciptakan secara kedinasan. Prestasi dinas merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh dinas atas usaha yang diperoleh.

Adapun prestasi yang telah diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Mendapatkan Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2017 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk mendapatkan Juara III Lomba Kampung Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
3. Posyandu Kampung Pandan Sari Kecamatan Segah mendapatkan Juara I Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau yang didukung oleh APBD. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.

Sepanjang Tahun 2017 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau. Beberapa keberhasilan yang telah diraih antara lain semakin meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat kampung, mengembangkannya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung, meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam pengelolaan SDA dan TTG, meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan dapat tersusunnya RPJMK. Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau tersebut telah dibuktikan dengan memperoleh Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2017 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan Juara 1 Posyandu Pandan Sari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan Juara 1 Posyandu Pandan Sari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta Juara III Kampung Giring-Giring Kecamatan Segah pada Lomba Kampung Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang telah dicapai adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, lembaga organisasi masyarakat perdesaan dan keseluruhan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau. Selain itu

walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di Tahun 2017.

## B. Saran

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan teknis penyusunannya.

Oleh karena itu diharapkan kepada Tim Penyusunan LKPj Bupati Berau dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau :

1. Apabila penyusunan LKPj oleh Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan setiap tahun perlu diadakan sosialisasi atau sejenisnya dengan narasumber tenaga ahli atau pejabat teknis dari Kementrian seperti yang dilakukan oleh Tim lain.
2. Untuk tahun yang akan datang perlu disampaikan atau diadakan rapat oleh Bupati untuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau tentang pentingnya penyusunan LKPj Organisasi Perangkat Daerah ini sehingga memudahkan dalam meminta data dan menyusunnya dalam bentuk laporan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan informasi dalam rangka penyusunan LKPj Bupati Berau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tanjung Redeb, 26 Maret 2018

Kepala Dinas,

Ir. H. Ilyas Natsir, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651231 199203 1 105

